

RENCANA KERJA KECAMATAN MUSTIKAJAYA TAHUN 2024



“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”

**KECAMATAN MUSTIKAJAYA
KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia Nya, Kecamatan Mustikajaya Pemerintah Kota Bekasi telah dapat menyelesaikan “RENCANA KERJA KECAMATAN MUSTIKAJAYA TAHUN 2024”. Rencana Kerja ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target Kecamatan Mustikajaya Pemerintah Kota Bekasi untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 selain itu dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin di capai.

Tersadari oleh kami bahwa Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, kami berharap dengan laporan ini, kebijakan, program dan kegiatan yang kami laksanakan dapat menunjang dan mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua komponen baik aparatur Pemerintah Kota Bekasi maupun masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024 ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Mustikajaya maupun pihak lain yang memerlukannya.

Bekasi, 02 Januari 2023



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MUSTIKAJAYA TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	33
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD	36
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Kemasyarakatan	47
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja Perangkat Daerah	49
3.3 Program dan Kegiatan	52
 BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	67
 BAB V PENUTUP.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bekasi melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 06 Tahun 2016 dan Perda No 07 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi menyusun Dokumen Renja 2024.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap satuan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana strategis (RENSTRA) sebagai proyeksi program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 3 tahun mendatang. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan kedalam penyusunan dokumen RENJA Perangkat Daerah per tahun, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis tiga tahun yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bekasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pemerintahan Umum sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi No. 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

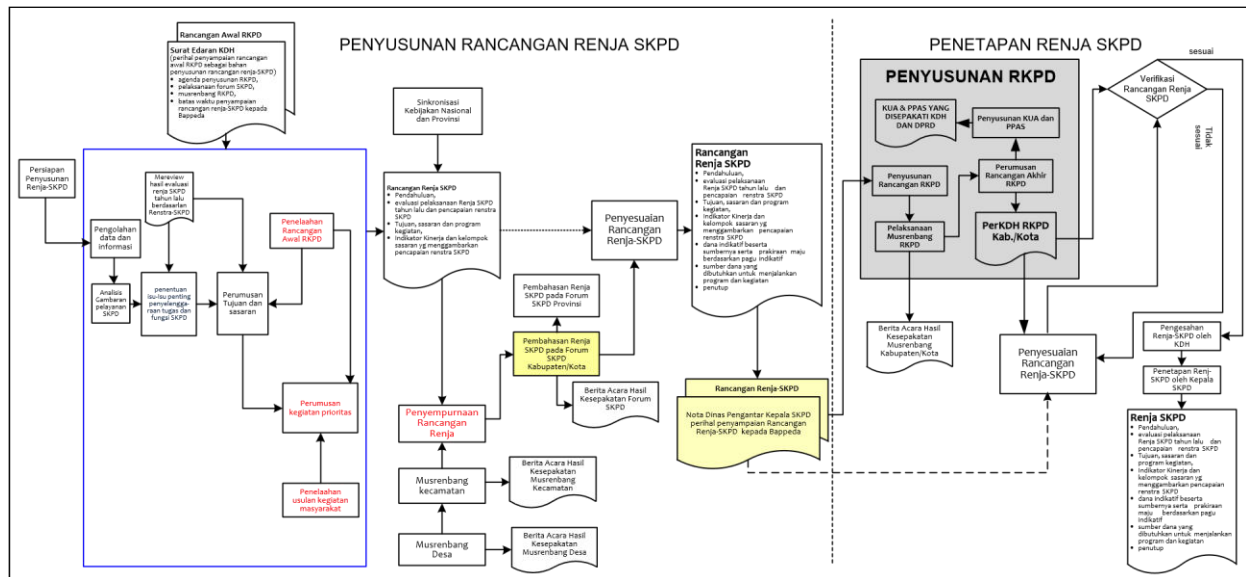
1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA

OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Persiapan Penyusunan Renja
- Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

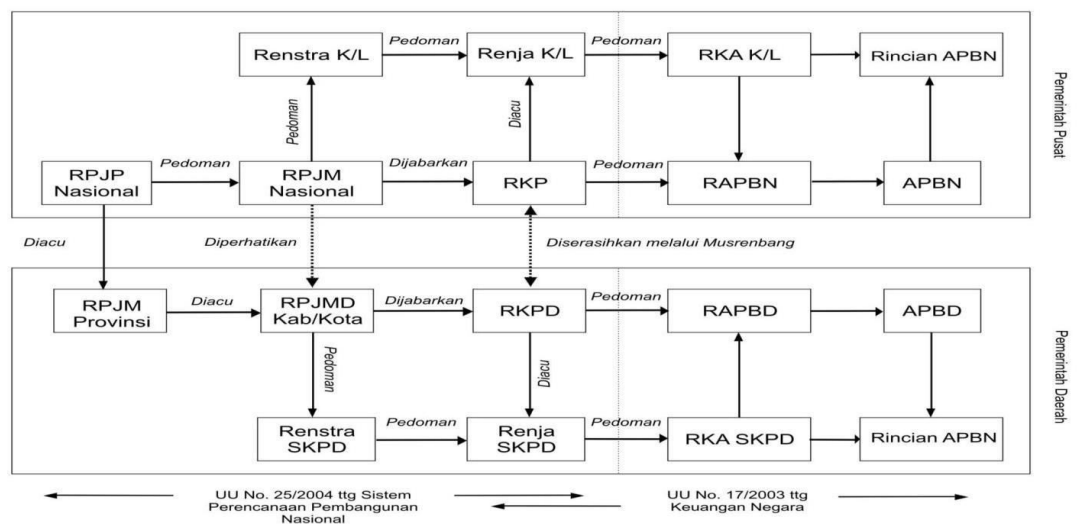
- Tahap Perumusan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan OPD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- Pembahasan forum OPD; dan

- Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.

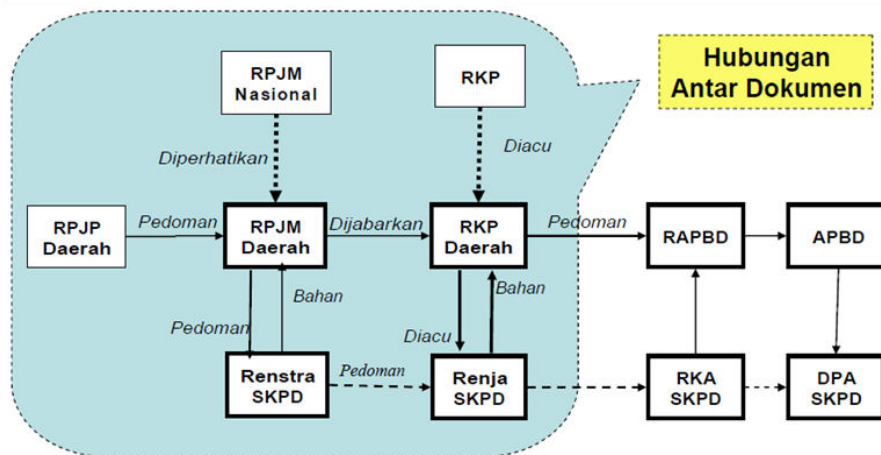
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:

Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran



1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

Keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya dengan Renja K/L dapat dilihat dari saling bersinerginya kegiatan yang ada di Renja K/L dengan Renja Kecamatan Mustikajaya dalam hal ini terdapat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dimana Indikator Programnya adalah Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dan Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan dan dapat dilihat pula keterkaitannya dengan Misi Kedua dari Renja K/L yaitu “ Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif “, untuk di Renja Kecamatan Mustikajaya terdapat juga Prioritas mengenai Peningkatan Pelayanan Publik dan sebagai tindak lanjut proses RAPBD dengan melaksanakan Program Prioritas Kecamatan Mustikajaya adalah :

1. Program Pengembangan Layanan Publik Berbasis IT;
2. Program Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan intensif bagi ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan Kelompok penggerak sosial lainnya;
3. Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 5 Seri E)
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).
22. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Penguatan Kapasitas Kader Pos Pelayanan Terpadu Pada Penyuluhan Pelayanan Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kader Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor Seri)
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas Di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor Seri)
24. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 31 Seri E)
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 45 Seri E)
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor .27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan Dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 27 Aseri E).
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 82 Seri E.
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi adalah untuk:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Mustikajaya tahun 2024 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di sektor Pemerintahan Umum selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan tata kelola administrasi di sektor Pemerintahan Umum serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

Tujuan

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
2. Memberikan acuan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mustikajaya tahun 2024;
3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD untuk menjawab tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Mustikajaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mustikajaya;
4. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil kegiatan pada Kecamatan Mustikajaya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) OPD sebagai bahan penyusunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun seperti yang diterakan di UU No. 25 Tahun 2004, yaitu : Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program-Program dan Kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi dan diwujudkan secara partisipasif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen *Stokeholders* Kota Bekasi.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya mengacu pada panduan Tata Cara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD. Sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Mustikajaya, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Mustikajaya, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Mustikajaya, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Mustikajaya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Mustikajaya, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Dalam bab ini menjelaskan tentang aspek kewilayahan Kecamatan Mustikajaya, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai target.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra Kecamatan Mustikajaya berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Mustikajaya. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan telaahan terhadap kebijakan nasional landasan hukum serta tujuan dan sasaran Renja OPD.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan Program dan Kegiatan yang akan dilakukan setahun kedepan serta Pendanaannya.

Bab V. Penutup

Dalam bab penutup akan dijabarkan kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan mengenai fungsi Renja atas kinerja tahunan. Disamping itu juga akan diberikan catatan dan harapan Camat Mustikajaya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mustikajaya ini menyajikan :

1. Hasil Review terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Penjabaran Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Mustikajaya)
2. Perkiraan Capaian Tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun 2024 yang sudah disahkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD, tidak semua program yang telah direncanakan terealisasi 100%. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya aparatur mengakibatkan Kecamatan Mustikajaya belum semuanya dapat terealisasi sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan, beberapa kegiatan yang sudah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan diantaranya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Mustikajaya sebesar 87,69 (*delapan puluh tujuh koma enam sembilan*), nilai tersebut didapatkan dari pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat mengenai pelayanan yang ada di Kecamatan Mustikajaya.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas aparatur dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan dan tentu akan menjadi modal dasar potensial yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, Hasil Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD dapat dilihat Tabel 2.1 dibawah ini.

Dampak yang terjadi dari penjelasan diatas yaitu Kecamatan Mustikajaya harus dapat mensosialisasikan segala Kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat

mengenai program-program yang akan dilaksanakan Kecamatan Mustikajaya agar masyarakat bisa merasakan dampak positif dari program yang bersinggungan langsung ke masyarakat.

Kebijakan / Tindakan Perencanaan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Mustikajaya untuk meningkatkan Pelayanan Publik antara lain melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat disetiap akhir semester yang targetnya telah ditetapkan dan harus tercapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), merenovasi ruang pelayanan Kecamatan Mustikajaya agar masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan merasa nyaman dan meningkatkan kualitas pegawai kecamatan melalui Bimbingan Teknis tentang Pelayanan Publik. Terkait dengan kebijakan dan tindakan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kecamatan Mustikajaya dalam hal ini kami akan melakukan pengawasan rutin terhadap titik K3 yang sudah ditetapkan persentase capaiannya sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebesar 75% dan juga akan lebih mensosialisasikan Program tersebut kepada masyarakat.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-1=2023) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : KecamatanMustikajaya

Lembar:

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
							TARGET RENJA SKPD TAHU 2023	REALISASI SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Unsur Kewilayahan								
				Kecamatan Mustikajaya								
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
					2. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
					3. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
					4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	644 orang/ bulan	644 orang/ bulan	644 orang/ bulan	644 orang/ bulan	644 orang/ bulan	644 orang/ bulan	644 orang/ bulan	644 orang/ bulan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar	8000 exemplar
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lapoaran	12 lapoaran	12 lapoaran	12 lapoaran	12 lapoaran	12 lapoaran	12 lapoaran	12 lapoaran
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Lapangan	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan/ Gedung yang terpelihara	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit	42 unit
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Mustikasari	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Padurenan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Cimuning	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Musrembang Kecamatan dan Kelurahan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
					Jumlah Kegiatan Musrembang Kecamatan dan Kelurahan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Event Hari Besar	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event
					Jumlah Event Keagamaan	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event
					Jumlah Event Kemasyarakatan	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event

					Jumlah Event Olahraga dan Seni	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event
					Jumlah Event Pembinaan Organisasi Kepemudaan	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event	1 event
					Jumlah laporan Kegiatan MUB Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah laporan Bulanan PKK Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Kegiatan Pembinaan Kader PKK Kecamatan dan PKP	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan PKK Kelurahan dan Posyandu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan MUB Kelurahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Rumah Ibadah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan PKK Kelurahan dan Posyandu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan MUB Kelurahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

					Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Rumah Ibadah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padurenan	Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan PKK Kelurahan dan Posyandu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan MUB Kelurahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Rumah Ibadah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimuning	Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan PKK Kelurahan dan Posyandu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan RT dan RW	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan MUB Kelurahan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
					Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Rumah Ibadah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba Kinerja Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	2 paket	2 paket
				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	2 paket	2 paket

				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Padurenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	2 paket	2 paket
				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Cimuning	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	2 paket	2 paket
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Padurenan	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cimuning	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pimpinan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Tertib K3	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas Tiga Pilar	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
					Jumlah Kegiatan Penertiban Reklame	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali
					Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kecamatan Mustikajaya ikut membantu dalam pencapaian IKK Kota Bekasi. Beberapa IKK memang menjadi tanggung jawab maupun kewenangan Dinas terkait. Namun Kecamatan Mustikajaya yang memiliki tugas yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 juga ikut mendukung capaian IKK tersebut yang berintegrasi dengan UPTD di wilayah maupun langsung ke Dinas. Beberapa IKK yang didukung oleh Kecamatan antara lain :

- a. Rasio rumah Ber-IMB;
- b. Kepemilikan e-KTP;
- c. Peningkatan PAD;
- d. Penghargaan dari pemerintah yang diterima;
- e. Rumah tangga bersanitasi;
- f. Rumah tangga pengguna air bersih;
- g. Rumah layak huni;
- h. Sarana dan Prasarana olahraga;
- i. Kepemilikan akte kelahiran;
- j. Pameran/Expo;
- k. PKK Aktif;
- l. Posyandu Aktif;

Berdasarkan IKK tersebut diatas, maka Kecamatan Mustikajaya memiliki indikator kinerja pelayanan yaitu Persentase Capaian IKK yang Meningkat di Kecamatan Mustikajaya. Indikator kesatu ini memiliki target yang sama sepanjang tahunnya yaitu 60% dan diharapkan capaian dapat meningkat setiap tahun.

Kecamatan Mustikajaya selaku OPD yang memiliki pelayanan langsung kepada masyarakat juga perlu melaksanakan survei kepuasan masyarakat untuk mendapatkan indeks kepuasan masyarakat. Sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Kecamatan Mustikajaya memiliki target awal IKM sebesar 81,5 (Tahun 2020) dan 82 (Tahun 2021). Penentuan target berdasarkan hasil evaluasi realisasi IKM diakhir periode Renstra 2013-2018 yaitu 82. Di dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 target IKM Kecamatan Mustikajaya dalam rentang waktu 5 tahun berkategori BAIK. Perhitungan IKM juga berpedoman pada peraturan tersebut.

Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) wilayah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan di Kecamatan Mustikajaya. Sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Kecamatan Mustikajaya perlu mewujudkan wilayah K3. Target setiap tahun berjenjang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat Mustikajaya. Target yang meningkat setiap tahunnya diharapkan dapat menjaga wilayah yang sebelumnya sudah tertib, bersih dan indah. Penilaian wilayah K3 berdasarkan kategori K3 dalam Perda tersebut.

Pencapaian kinerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi sebagaimana dalam tabel berikut :

Dalam mencapai tujuan, maka Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mustikajaya dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang telah tertuang dalam RPD Kota Bekasi 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)
1	Persentase LPM Aktif	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase PKK Aktif	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Posyandu Aktif	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat	18%	21%	26%	30%	18%	21%	26%	30%
5	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Tersedianya Monografi RT, RW Kelurahan dan Kecamatan yang Lengkap dan Terbaharui	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Kenaikan Jumlah Masyarakat yang mengikuti Event Sosial Kemasyarakatan	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat	80%	80%	85%	85%	80%	80%	85%	85%
8	Persentase Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	Otonomi Daerah	Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Wilayah Tertib K3	Pencegahan Konflik Sosial dan penanggulangan terorisme	Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel. 2.3
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2020

KOTA : KOTA BEKASI

NAMA OPD : KECAMATAN MUSTIKAJAYA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEMERINTAHAN UMUM, KETERTIBAN UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional 1 (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional(RKP), sebanyak 2 program - Jumlah program nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 2 program	100%	Lihat Program Nasional RKP 2020 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada,sebutkan ada banyak 20yang terdiri dari: 1. SOP ttg Perekaman KTP Elektronik/E-KTP	Ada 20 SOP	SOP yg dimaksud`adalah SOP tehnik adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

					2. SOP ttg Pengantar Surat Pindah 3. SOP ttg Pengantar PembuatanKartu keluarga (KK) 4. SOP ttg Pengantar KTP SIAK 5. SOP ttg Pengantar Akta Kelahiran 6. SOP ttg Permohonan Keterangan Ahli Waris 7. SOP ttg Permohonan Peralihan Tanah 8. SOP ttg Izin Tempat Usaha/Gangguan (HO) 9. SOP ttg Pemasangan Izin Reklame 10. SOP ttg Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian 11. SOP ttg Pengantar Izin Rame-rame 12. SOP ttg Domisili Yayasan, Klinik dan Sekolah (Paud, TPQ, TK, SD, SMP, SMA)		
--	--	--	--	--	--	--	--

						13. SOP ttg Keterangan Dispensasi Pernikahan Non Muslim		
						14. SOP ttg Penerbitan Rekomendasi Yayasan, Klinik dan Sekolah (Paud, TPQ, TK, SD, SMP, SMA) 15. SOP ttg Penerbitan Domisili Haji 16. SOP ttg Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 17. SOP ttg Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan 18. SOP ttg Rekomendasi Pendirian Tower/BTS 19. SOP ttg Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro 20. SOP ttg Surat Izin Mendirikan Bangunan		

2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2	100%	Normalisasi
						- PERDA yang seharusnya, sebanyak 2		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jabatan yang ada sebanyak 29	100%	Sumber data BKD/DUK OPD
						Jabatan yang harus ada, sebanyak 29		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	tidak ada	Sumber data BKD/OPD. Mengacu kondisi OPD terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS terhadap Total PNS Kota	- PNS OPD , sebanyak 52 personil	0,416 %	Sumber data Mengacu kondisi OPD terakhir/updated Tahun 2019/ BKD.
						- Total PNS Kota, sebanyak 12.500 personil		

			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 21 org.	72,41%	Sumber data OPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2020.
						- Pejabat yang ada, sebanyak 29 org.		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 29 org.	100%	Sumber Data OPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2020.
						Jabatan yang ada, sebanyak 29 jbt.		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD	Ada atau tidak Ada dokumen perencanaan	Apabila Ada Sebutkan Dokumen yang ada Tahun 2020, Sebanyak 3 jenis yang terdiri dari :	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/OPD yang bersangkutan
				RENSTRA OPD RENJA OPD RKA-OPD	OPD Berikut Jumlahnya	1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA		

		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak 2 program.	100%	Sumber data OPD Mengacu dokumen RKPD tahun 2020 dan Renja-OPD.
						Jumlah Program dalam Renja OPD yang ditetapkan sebanyak 2		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 7 program.	100%	Sumber data OPD. Mengacu dokumen RKA-OPD tahun 2020 dan Renja-OPD.
						Program dalam RKA OPD, sebanyak 7program.		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak 7 program.	100%	Sumber data dari dokumen RKA- OPD tahun 2030 dan dokumen DPA-OPD tahun 2020.
						Jumlah Program dalam DPA OPD, sebanyak 7 program.		
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran OPD, sebesar Rp, 10.105.541.400	0,801%	Sumber data dari APBD tahun 2020 terakhir. (anggaran)
						Total Belanja APBD, sebesar Rp 12.609.989.333		

		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja OPD	Belanja modal dibagi total belanja OPD x 100%	Belanja Modal OPD, sebesar Rp. 12.580.400	0,009%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2020 terakhir.
						Total Belanja OPD, sebesar Rp.12.609.989.333		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa OPD) x 100%	Total belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 9.206.209.155	0,730%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2020 terakhir.
						Total belanja barang dan jasa OPD, sebesar Rp. 12.609.989.333		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja OPD x 100%	total belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp. 355.000.000	0,028%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2020 terakhir.
						Total belanja OPD, sebesar Rp. 12.609.989.333		
		Laporan keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Laporan Keuangan ada,Sebanyak 3 Jenis.	Ada sebanyak 3 jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan OPD. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
						1. Neraca 2. LRA 3. CALK		

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Adanya inventarisasi barang/asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset OPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	tidak ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.	0%	Pembilang :
						Asset yang dikuasai OPD, Sebesar Rp. 41.579.246.199.		1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan)
				1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mas Media		1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mas Media		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survei Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Unsur Pelayanan	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/OPD.

Kecamatan Mustikajaya dalam menjalankan atau memberikan pelayanan terhadap masyarakat belum memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal), namun upaya peningkatan kinerja pelayanan di lingkungan Kecamatan Mustikajaya dilakukan secara terukur, yang berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Daerah dan kemudian ditetapkan guna mencapai masing-masing sasaran strategis. sebagaimana tertera pada tabel di atas terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang telah memiliki formula penghitungannya masing-masing. Rumusan penghitungan/ formulasi tersebut disesuaikan dengan tugas, fungsi dari Kecamatan Mustikajaya sehingga tiap-tiap indikator tersebut memiliki penanggungjawab dari masing-masing seksi yang berbasis data.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2023 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 91,23%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Kecamatan Mustikajaya sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam mengimplementasikan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)..
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Sarana dan prasarana dalam pelayanan belum optimal.

Pelayanan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Kecamatan. Adapun tantangan di bidang perdagangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi antara lain sebagai berikut:

Kekuatan (*STRENGTHS*)

1. Letak geografis yang memiliki batas langsung dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi sebagai sentra Industri dan perdagangan;
2. Lokasi Kantor Kecamatan yang berada dalam satu kompleks dengan instansi pemerintahan lainnya (Polsek, Koramil, KUA, UPT, Puskesmas, RSUD Tipe D, Pasar) yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan;

3. Adanya SOP sesuai ketugasan;
4. Koordinasi, komunikasi, sinkronisasi tugas pekerjaan antara kelurahan dan kecamatan.

Kelemahan(*WEAKNESSES*)

1. Jumlah personil yang ada dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang;
2. Belum adanya tenaga teknis terkait pelayanan perizinan;
3. Sarana dan prasarana instansi perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat;
4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.

Peluang (*OPPORTUNITIES*)

1. Adanya potensi dan sumberdaya sosial, ekonomi/ kelembagaan di wilayah;
2. Adanya komitmen kepala Daerah untuk mengembangkan Kecamatan/ Wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat;
3. Adanya sarana kesehatan (RSUD, Rumah sakit swasta, Puskesmas).

Ancaman (*THREATS*)

1. Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi;
2. Tidak adanya sumberdaya alam sehingga hanya sektor jasa yang diandalkan untuk sumber PAD;
3. Luasnya wilayah sehingga tingkat permasalahan cukup tinggi.

Faktor kunci keberhasilan

1. Adanya peningkatan kapasitas instansi;
2. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat;
3. Adanya kepercayaan kepada birokrat;
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana;
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas Aparatur Pemerintah baik dari aspek intelektualitas, keterampilan maupun mentalitas;

7. Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama, kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis untuk dapat mengetahui menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Mustikajaya.

Proses penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2023, yang di dalamnya memuat sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah Kecamatan Mustikajaya.

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, Kecamatan Bantargebang telah menyusun Visi, Misi dan Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program yang akan dilaksanakan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Mustikajaya. Ruang Lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kota Bekasi secara keseluruhan.

Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan harus dilaksanakan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang telah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi rencana kerja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

- Penetapan status hukum naskah perencanaan ini sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat di pertanggungjawabkan;
- Pengkomunikasian/ sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang telibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.

Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renstra yang telah dibuat Perlunya sinergitas dengan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Mustikajaya dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2024 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Bekasi

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp0)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp0)	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
	Unsur Kewilayahan				29,456,120,400	Unsur Kewilayahan				29,456,120,400	
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Mustikajaya	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	270,000,000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Mustikajaya	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	270,000,000	
I.	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	120,000,000	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	120,000,000	
1.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	40,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	40,000,000	PAD
2.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000		Kel. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000	PAD

3.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Mustikasari	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000		Kel. Mustikasari	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000	PAD
4.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Padurenan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000		Kel. Padurenan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000	PAD
5.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Cimuning	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000		Kel. Cimuning	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000	PAD
II	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	150,000,000			Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	150,000,000	
6.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan		Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan	150,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan		Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan	150,000,000	PAD
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Yang Aktif	100%	9,861,386,000			Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Yang Aktif	100%	9,861,386,000	

II.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	9,701,386,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	9,701,386,000	
7.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga kemasyarakatan	100,000,000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga kemasyarakatan	100,000,000	PAD
8.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	174,436,400	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	174,436,400	PAD
9.	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Kegiatan Lomba Kinerja Kelurahan	1 kegiatan	30,000,000	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Kegiatan Lomba Kinerja Kelurahan	1 kegiatan	30,000,000	PAD
10.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Pemeliharaan Taman	2 paket	200,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Pemeliharaan Taman	2 paket	200,000,000	DAU
11.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Pemeliharaan Taman	2 paket	200,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Pemeliharaan Taman	2 paket	200,000,000	DAU
12.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Pemeliharaan Taman	2 paket	200,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Pemeliharaan Taman	2 paket	200,000,000	DAU
13.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Pemeliharaan Taman	2 paket	200,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Pemeliharaan Taman	2 paket	200,000,000	DAU
14.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	360 Pokmas / Ormas	2,702,863,200	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	360 Pokmas / Ormas	2,702,863,200	PAD

			Kelurahan					Kelurahan			
15.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294 Pokmas / Ormas	1,340,664,800	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294 Pokmas / Ormas	1,340,664,800	PAD
16.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291 Pokmas / Ormas	2,272,575,200	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291 Pokmas / Ormas	2,272,575,200	PAD
17.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas / Ormas	2,280,846,400	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas / Ormas	2,280,846,400	PAD
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	160,000,000			Persentase Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	160,000,000	
19.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Laporan	12 laporan	40,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Laporan	12 laporan	40,000,000	PAD
20.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikasari	Jumlah Laporan	12 laporan	40,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikasari	Jumlah Laporan	12 laporan	40,000,000	PAD
21.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Padurenan	Jumlah Laporan	12 laporan	40,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Padurenan	Jumlah Laporan	12 laporan	40,000,000	PAD
22.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Cimuning	Jumlah Laporan	12 laporan	40,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Cimuning	Jumlah Laporan	12 laporan	40,000,000	PAD

C.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100 %	40,000,000			Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100 %	40,000,000	
IV.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Mustikajaya	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	40,000,000			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	40,000,000	
23.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pimpinan	12 laporan	40,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pimpinan	12 laporan	100,000,000	PAD
D.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase Wilayah Tertib K3	100 %	413,155,600	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase Wilayah Tertib K3	100 %	413,155,600	
V.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	413,155,600	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	413,155,600	
24.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	80,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	80,000,000	PAD

25.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	333,155,600	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	333,155,600	PAD
-----	--	--	--	------------	-------------	--	--	--	------------	-------------	-----

	Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum					Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum					
	Unsur Kewilayahan					Unsur Kewilayahan					
E.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	18.871,578,800	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	18,174,460,700	
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		
			Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%				Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%		
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		

			Optimaslisasi Disiplin Aparatur	100%				Optimaslisasi Disiplin Aparatur	100%		
VIII	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		
25.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	3,000,000	APBD
IX.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100 %	10,090,700,000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100 %	10,090,700,000	
26.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan Premi BPJS	644 orang/bulan	10,087,700,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan Premi BPJS	644 orang/bulan	10,087,700,000	APBD
27.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan	12 laporan	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan	12 laporan	3,000,000	APBD
X.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100,000,000	
28.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pegawai	185 orang	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pegawai	185 orang	100,000,000	PAD
XI.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	426,600,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	426,600,000	

29.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	20,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	20,000,000	PAD
30.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	242,210,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	242,210,000	PAD
31.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	47,790,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	47,790,000	PAD
32.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	25,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	25,000,000	PAD
33.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Mustikajaya	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah	12 laporan	20,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Mustikajaya	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah	12 laporan	20,000,000	PAD
34.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	61,600,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	61,600,000	PAD
35.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Arsip yang ditata/ dikelola	12 laporan	10,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Arsip yang ditata/ dikelola	12 laporan	10,000,000	PAD
XII.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mustikajaya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	360,000,000			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	360,000,000	

36.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Peralatan	21 unit	360,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Mustikajaya	Jumlah Peralatan	21 unit	360,000,000	PAD
XIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	7,471,278,800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	7,471,278,800	
37.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	200,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	200,000,000	PAD
38.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,271,278,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,271,278,800	PAD
XIV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	420,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	420,000,000	
39.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	50,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	50,000,000	PAD
40.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	140,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	140,000,000	PAD
41.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	42 unit	30,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42 unit	30,000,000	PAD

			Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					yang Dipelihara/Direhabilitasi			
42.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	200,000,000	PAD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah khususnya di wilayah Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yaitu melalui Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang Kecamatan Merupakan Forum Musyawarah Tahunan Para Pemangku Kepentingan di Tingkat Kecamatan untuk Mendapatkan Masukan mengenai kegiatan Prioritas Pembangunan di Wilayah Kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari Kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan.

Musrenbang Kecamatan tidak hanya menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di Kelurahan yang di usulkan dari Musrenbang Kelurahan, tetapi untuk menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi urusan dan kewenangan wajib dan pilihan pemerintah daerah. Selain itu musrenbang juga merupakan forum pendidikan bagi masyarakat agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Bekasi Kecamatan Mustikajaya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran, pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri sebagai berikut:

Visi Kementerian Dalam Negeri mengikuti visi pemerintah yaitu: **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”**

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2020 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2020, sebagai berikut:

T1 :Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara; II-3

- T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
- T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, seperti yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026, perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi unsur organisasi kecamatan, sedangkan tujuan dan sasaran yang menjadi dasar target Kecamatan Mustikajaya adalah sebagai berikut:

TUJUAN	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel
INDIKATOR TUJUAN	: Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN	: Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah
INDIKATOR SASARAN	: 1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik
TUJUAN	: Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman
INDIKATOR TUJUAN	: Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban
SASARAN	: Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi yang kuat
INDIKATOR SASARAN	: Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban

Adapun Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2 adalah sebagai berikut:

Table 3.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MUSTIKAJAYA
TAHUN 2024

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA SASARAN					SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/CAR A PENGUKURAN		2024	2025	2026			
1	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP = nilai komponen perencanaan kinerja+nilai komponen pengukuran kinerja+nilai komponen evaluasi internal+nilai komponen capaian kinerja	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 5. Bagian Tata Usaha 6. Seksi Ketertaman dan Ketertiban.	71	73	75			Hasil Perhitungan dan Laporan

		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai	Bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Rawalumbu adalah masyarakat yang menerima layanan.	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.	84	85	86			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
2	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persen (%)	Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan.	(Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah zona tertib) x 100 %	1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.	75%	80%	85%			Hasil Perhitungan dan Pelaporan

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 , Ditinjau dari sisi tugas pembangunan, secara umum tugas Kecamatan Mustikajaya terkait dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026, maka secara khusus tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Tujuan ke 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel dan Tujuan ke 4 Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman.

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU 2024	KET
1.	1	7	18	18,871,460,700	BLPU
2.	4	7	24	10,584,659,700	BLU
Jumlah	5	14	42	29,456,120,400	

Uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif akan dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut:

Program Kecamatan Mustikajaya merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Mustikajaya kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Mustikajaya. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas,

diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Programprogram prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kecamatan Mustikajaya namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, seperti yang tertuang dalam visi dan misi kecamatan, setelah dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi unsur organisasi kecamatan. Perlu dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Sebagai Berikut :

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
I.	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
1.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Mustikajaya
2.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikajaya
3.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikasari

4.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Padurenan
5.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Cimuning
II.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
6.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
III.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
8.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
9.	Evaluasi Kelurahan
10.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Mustikajaya
11.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Mustikasari
12.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Padurenan
13.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Cimuning
14.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikajaya
15.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikasari
16.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padurenan
17.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimuning
IV.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
18.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
V.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
19.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya
20.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikasari
21.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Padurenan
22.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cimuning
C.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
VI.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
23.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
D.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
VII.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
24.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
25.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
E.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
VIII.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
IX.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
26.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
27.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
X.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

28.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
XI.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
29.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
30.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
31.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
32.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
33.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
34.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
35.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
XII.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
XIII.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
37.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
38.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
XIV.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
39.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
40.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
41.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
42.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.5 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Bekasi

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Tahun 2024(N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp0)		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
	Unsur Kewilayahan									
	Kecamatan Mustikajaya				29,456,120,400	APBD			29,456,120,400	APBD
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	18.871,578,800	APBD	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	18,925,758,800	APBD
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		
			Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%			Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%		
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		
			Optimaslisasi Disiplin Aparatur	100%			Optimaslisasi Disiplin Aparatur	100%		
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan		Persentase Penyusunan	100 %			Persentase Penyusunan Perencanaan,	100 %		

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	3,000,000	APBD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	10,000,000	APBD
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	10,090,700,000		Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	10,090,700,000	
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mustikajaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	644 orang/bulan	10,087,700,000	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	644 orang/bulan	10,087,700,000	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	3,000,000	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	3,000,000	APBD
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100,000,000		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	185 orang	100,000,000	APBD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	185 orang	10,000,000	APBD

IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	426,600,000	APBD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	475,000,000	APBD
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	20,000,000	APBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	30,000,000	APBD
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	242,210,000	APBD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	260,000,000	APBD
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 dokumen	47,790,000	APBD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 dokumen	50,000,000	APBD
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 laporan	25,000,000	APBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 laporan	25,000,000	APBD
9.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Mustikajaya	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah	12 laporan	20,000,000	APBD	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah	12 laporan	30,000,000	APBD
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	101,600,000	APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	70,600,000	APBD
11.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Mustikajaya	Jumlah Arsip yang ditata/ dikelola	12 laporan	10,000,000	APBD	Jumlah laporan	12 laporan	10,000,000	APBD
X.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Mustikajaya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	360,000,000		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	199,780,000	

12.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	21 unit	360,000,000	APBD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	21 unit	199,780,000	APBD
XI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	7,471,278,800		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7,521,278,800	
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	200,000,000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	250,000,000	APBD
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,271,278,800	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,271,278,800	APBD
XII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	420,000,000		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	524,000,000	
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dan perijinannya	2 unit	50,000,000	APBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dan perijinannya	2 unit	70,000,000	APBD
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	140,000,000	APBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	200,000,000	APBD
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 unit	200,000,000	APBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 unit	200,000,000	APBD

18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 unit	30,000,000	APBD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 unit	54,000,000	APBD
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Mustikajaya	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	270,000,000		Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	180,000,000	
XIII	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 %	120,000,000		Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 %	120,000,000	
19.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	40,000,000	APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000	APBD
20.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000	APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000	APBD
21.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang	Kel. Mustikasari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau	12 laporan	20,000,000	APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau	12 laporan	20,000,000	APBD

	Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
22.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Padurenan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000	APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000	APBD
23.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kel. Cimuning	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000	APBD	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000	APBD
IX.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Mustikajaya	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	150,000,000		Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	60,000,000	
24.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	150,000,000	APBD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	60,000,000	APBD
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Yang Aktif	100%	9,981,386,000		Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Yang Aktif	100%	9,866,949,600	

X.	Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	9,821,386,000		Persentase Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	9,706,949,600	
25.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga kemasyarakatan	100,000,000	APBD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga kemasyarakatan	100,000,000	APBD
26.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	174,436,400	APBD	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	180,000,000	APBD
27.	Evaluasi Kelurahan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	30,000,000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	30,000,000	APBD
28.	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mustikajaya	Kel. Mustikajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200.000.000	DAU
29.	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mustikasari	Kel. Mustikasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200.000.000	DAU
30.	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Padurenan	Kel. Padurenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200.000.000	DAU
31.	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Cimuning	Kel. Cimuning	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200.000.000	DAU

32.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	360 Pokmas / Ormas	2,702,863,200	APBD	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	360 Pokmas / Ormas	2,702,863,200	APBD
33.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Mustikasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294 Pokmas / Ormas	1,340,664,800	APBD	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294 Pokmas / Ormas	1,340,664,800	APBD
34.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Padurenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291 Pokmas / Ormas	2,272,575,200	APBD	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291 Pokmas / Ormas	2,272,575,200	APBD
35.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Cimuning	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas / Ormas	2,280,846,400	APBD	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas / Ormas	2,280,846,400	APBD
XI.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	160,000,000		Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	160,000,000	
36.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikajaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	APBD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	APBD

37.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Mustikasari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	APBD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	APBD
38.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Padurenan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	APBD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	APBD
39.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kel. Cimuning	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	APBD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 lembaga kemasyarakatan	40,000,000	APBD
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100 %	40,000,000		Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100 %	40,000,000	
XII.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Mustikajaya	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	100 %	40,000,000		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	100 %	40,000,000	
40.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	12 dokumen	40,000,000	APBD	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	12 dokumen	40,000,000	APBD
E.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mustikajaya	Persentase Wilayah Tertib K3	100 %	413,155,600		Persentase Wilayah Tertib K3	100 %	443,412,000	
XIII	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	100 %	413,155,600		Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	443,412,000	

			Ketertiban Umum							
41.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	80,000,000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	50,000,000	APBD
42.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Mustikajaya	Jumlah Laporan Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	333,155,600	APBD	Jumlah Laporan Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	393,412,000	APBD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Terdapat 5 Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mustikajaya dan Kelurahan terdiri dari 13 Kegiatan dan 42 Subkegiatan. Program yang dilakukan oleh Kecamatan Mustikajaya mendukung Program Kota Bekasi tahun 2024-2026.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Anggaran Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Ket.
						Target	Rp		
UNSUR KEWILAYAHAHN									
KECAMATAN MUSTIKAJAYA							29.456,120,400		
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Mustikajaya	Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik	Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya		A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	18.871,578,800		
					Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			
					Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			
					Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%			
					Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%			
				I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,	Persentase Penyusunan Perencanaan,	100 %	3,000,000		

				dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Sub Kegiatan :					
				1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	3,000,000		APBD
				II Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	10,090,700,000		
				Sub Kegiatan :					
				2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	644 orang/bulan	10,087,700,000		APBD
				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	3,000,000		APBD
				III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100,000,000		
				4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	185 orang	100,000,000		APBD

				dan Fungsi	Pelatihan				
				IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	426,600,000		
				Sub Kegiatan :					
				5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	20,000,000		APBD
				6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	242,210,000		APBD
				7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	47,790,000		APBD
				8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	25,000,000		APBD
				9. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah	12 laporan	20,000,000		APBD
				10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	61,600,000		APBD
				11. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata/ dikelola	12 laporan	10,000,000		APBD

				V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	360,000,000		
				12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	360,000,000		APBD
				VI. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7,471,278,800		
				13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	200,000,000		APBD
				14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,271,278,800		APBD
				VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	420,000,000		
				15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	50,000,000		APBD

				16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	140,000,000		APBD
				17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	200,000,000		APBD
				18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 unit	30,000,000		APBD
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik		B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	100%	270,000,000		
				VIII	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100 %	120,000,000		
				Sub Kegiatan :						
				19.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau	12 laporan	40,000,000		APBD

				Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				
				20. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000		APBD
				21. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000		APBD
				22. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	12 laporan	20,000,000		APBD

				Pelayanan Umum di Kelurahan Padurenan	Pelayanan Umum				
				23. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Cimuning	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	20,000,000		APBD
				IX. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	150,000,000		
				Sub Kegiatan :					
				24. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	150,000,000		APBD
		Nilai AKIP Kecamatan Mustikajaya		C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Yang Aktif	100%	9,861,386,000		
				X. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan	100 %	9,701,386,000		

					Kelurahan				
				Sub Kegiatan :					
				25. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga kemasyarakan	100,000,000		APBD
				26. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	174,436,400		APBD
				27. Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	30,000,000		APBD
				28. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	360 Pokmas / Ormas	2,702,863,200		APBD
				29. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	294 Pokmas / Ormas	1,340,664,800		APBD
				30. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padurenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	291 Pokmas / Ormas	2,272,575,200		APBD

					Kelurahan				
				31.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimuning	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	243 Pokmas / Ormas	2,280,846,400	APBD
				32.	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mustikajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	APBD
				33.	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	APBD
				34.	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Padurenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	APBD
				35.	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Cimuning	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 paket	200,000,000	APBD
				XI.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	160,000,000	
				36.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga	2 lembaga kemasyaraka	40,000,000	APBD

				Kelurahan Mustikajaya	Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya	tan			
				37. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikasari	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakan	40,000,000		APBD
				38. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Padurenan	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakan	40,000,000		APBD
				39. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cimuning	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya	2 lembaga kemasyarakan	40,000,000		APBD
				D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100 %	40,000,000		
				XII. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	100 %	40,000,000		
				Sub Kegiatan :					
				40. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan	12 laporan	40,000,000		APBD

Mewujudkan Kecamatan Mustikajaya Yang Aman dan Nyaman	Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Wilayah Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib		E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib K3	100 %	413,155,600		
				XIII. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	413,155,600		
				41. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	80,000,000		APBD
				42. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	333,155,600		APBD

BAB V PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Mustikajaya dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya rencana kerja Kecamatan Mustikajaya. Ada beberapa catatan penting yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan Peningkatan Kualitas SDM, Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Renovasi Ruang Pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat seperti harus diadakannya Bimbingan Teknis kepada petugas pelayanan, merenovasi ruang pelayanan agar menjadi lebih nyaman dan Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan yang sekarang akan berjalan menggunakan OSS (*Online System Submission*).

Beberapa hal penting yang perlu untuk mendapat perhatian dalam rencana kerja ini adalah bahwa Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024 merupakan sebuah dokumen perencanaan jangka pendek /dokumen operasionalisasi dari Rencana Strategis yang berdurasi lima tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya dalam proses penyusunannya mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas output perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah dengan tolok ukur kinerja adalah capaian RPD Kota Bekasi 2024-2026. Proses penyusunan Rencana Kerja ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam Rencana Kerja secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan

pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Rencana Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat dengan Sekretaris Kecamatan Mustikajaya;
2. Seluruh komponen seksi dan sub bagian pada Kecamatan Mustikajaya agar melaksanakan program-program dalam Rencana kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
3. Program-program yang tercantum dalam Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024 diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya namun juga harus memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
4. Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
5. Agar Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Kecamatan Mustikajaya diharapkan mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas;
6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2024, sebagai berikut :
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing seksi/bagian;
 - b. Camat Mustikajaya menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

- c. Kepala seksi melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja seksi periode sebelumnya;
- d. Camat Mustikajaya menyusun evaluasi rencana kerja berdasarkan hasil evaluasi bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
- e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja Camat Mustikajaya dihadapkan pada hal-hal di luar kendali, maka Konsepsi Strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali.

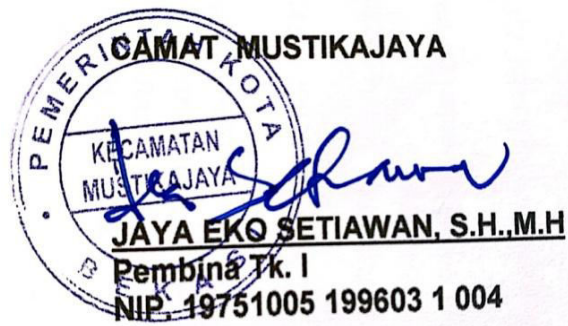
Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Mustikajaya. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan draft Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu lakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian rumusan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Mustikajaya.

Bekasi, 02 Januari 2023



PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN MUSTIKAJAYA
Jl. Raya Mustikajaya – Legenda No. 58
Kota Bekasi, Kode Pos 17158
Telepon dan Fax (021)82603561
Email:
mustikajayakecamatan@gmail.com